

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, bahkan Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. (BPS, 2010:6). Jumlah tersebut, pada akhirnya naik menjadi 255,5 juta orang pada tahun 2015 sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2015:21).

Akan tetapi, besarnya jumlah penduduk Indonesia tersebut dibarengi juga dengan semakin besar pula angka kemiskinan yang terjadi. Masih banyak penduduk Indonesia yang berada dalam angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS (2017:97) pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), menurun 0,25 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebanyak 28,01 juta orang (10,86 persen). Meskipun angka kemiskinan per September 2016 menurun, akan tetapi angka tersebut masih tergolong tinggi untuk sebuah angka kemiskinan.

Masih tingginya angka kemiskinan, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat. Berbagai program dan stimulus kebijakan dan program telah digulirkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengentasan

kemiskinan tersebut. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan serta dilaksanakan sejak tahun 2007. Menurut Dirjen Pengelolaan Keuangan Kemenkeu (2015:2) mengatakan bahwa PKH merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin berupa bantuan tunai bersyarat yaitu Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan. Program tersebut merupakan kerjamama lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program perlindungan sosial dengan pemberian uang secara tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) khususnya untuk yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, serta memiliki anak balita usia dibawah 6 tahun dan bagi yang memiliki anak usia SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat (anak yang belum menyelesaikan pendidikan wajib selama 12

tahun), kemudian untuk anak disabilitas berat dan lansia usia atau lansia berumur 70 tahun ke atas.

Menurut Dirjen Pengelolaan Keuangan Kemenkeu (2013:15), Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijadikan sebagai program nasional. Dalam hal ini terdapat dua pengertian, yaitu PKH yang telah mencapai seluruh provinsi di Indonesia, dan PKH telah dilakukan secara serentak oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan tupoksinya. Oleh karena telah menjadi program nasional, maka Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul mulai dilaksanakan pada tahun 2008 dengan sasaran program baru di 5 Kecamatan dan 5 Pendamping meskipun secara keseluruhan di Bantul ada 17 kecamatan. Akan tetapi berdasarkan data yang dikutip dari (Bappeda Kab. Bantul. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015*. Hal. 38-39), pada tahun 2008 Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Bantul bertambah menjadi 797 RTSM yang tersebar di Kecamatan Kasihan, Sewon, Sanden, Imogiri dan Dlingo. Selanjutnya, lokasi PKH ditambah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Pandak dan pada akhirnya mulai tahun 2010 lokasi PKH ditambah lagi sebanyak 10 kecamatan, sehingga 17 kecamatan di Kabupaten Bantul telah mendapatkan program PKH.

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul sudah membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH) antar Dinas/Instansi untuk berkoordinasi mengenai PKH. Pada tahun 2016 Pendamping dan Operator PKH

Kabupaten Bantul ada 39 Pendamping, 4 Operator dan 1 Koordinator Kabupaten. Dengan jumlah Pendamping dan Operator yang berjumlah 44 orang tersebut, masih dirasa kurang oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal tersebut dipertegas dengan beredarnya berita bahwa pemerintah Kabupaten Bantul masih membutuhkan tambahan orang sebagai pendamping program keluarga harapan dikarenakan bertambahnya jumlah penerima program tersebut. Pada bulan September 2016 Pendamping dan Operator PKH kabupaten Bantul berjumlah 69 orang. Seiring bertambahnya jumlah peserta PKH setiap tahun nya maka pada tahun 2017 jumlah pendamping menjadi 224 pendamping, 13 operator, 2 supervisor, 2 koordinator kabupaten dan setiap satu pendamping harus mendampingi sekitar 200-300 peserta PKH pada daerah yang masuk dalam kategori daerah sulit dan 250-300 peserta PKH untuk daerah mudah.

Pendamping merupakan salah satu pihak yang paling penting dalam mensukseskan PKH. Pendamping merupakan pihak yang menjadi pelaksana Program Keluarga Harapan pada tingkat kecamatan. Keberadaan pendamping sangat diperlukan mengingat masyarakat miskin secara keseluruhan memiliki keterbatasan, dan tidak memiliki kekuatan, tidak mempunyai suara serta adanya keterbatasan mereka untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Sehingga, mereka perlu seseorang yang mampu untuk mengakomodir dan mewakili kepentingannya untuk dapat menyuarakan apa yang tidak mampu mereka suarakan. disamping itu, pendamping juga dibutuhkan dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari UPPKH Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya di semua kecamatan secara bersamaan.

Keterbatasan jumlah petugas menjadi hal yang menambah kesulitan di dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan yang muncul termasuk juga dalam mendaklanjuti permasalahan tersebut secara tepat dan cepat. Sehingga memang keberadaan pendamping sangatlah membantu dan keberadaannya begitu dibutuhkan untuk membantu kesuksesan Program Keluarga Harapan.

Kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) selaku ujung tombak tingkat basis yaitu melakukan motivasi terhadap KSM saling berbagi pengetahuan sesama KSM, saling kontrol antara peserta PKH dan bidan desa, jika anak dari peserta PKH tidak berkunjung ke fasilitas kesehatan posyandu dan puskesmas untuk memeriksakan kandungan dan balitanya atau tidak rajin ke fasilitas pendidikan, pendamping juga menjadi sarana untuk menampung permasalahan yang di hadapi peserta Program keluarga Harapan (PKH), pendamping juga memfasilitasi KSM jika mereka kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pendampingan bidang kesehatan yaitu faskes seperti (puskesmas, pustu, dan posyandu) dan fasilitas pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) selanjutnya per tri wulan pendamping mendistribusi dan menverifikasi kehadiran atau komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan melakukan pertemuan secara rutin dengan guru atau kepala sekolah dan bidan desa atau para kader posyandu.

Pendamping seperti yang sudah disinggung sebelumnya memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan PKH. Adapun peran dan keterampilan yang dapat dilakukan pendamping PKH antara lain: sebagai

fasilitator, pendidik, perwakilan dan teknikal. Oleh karena itu, mengingat begitu besarnya peran pendamping dalam kesuksesan dan keberhasilan PKH, maka perlu dilakukannya proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan PKH terutama di Kabupaten Bantul agar apa yang diharapkan dari Program Keluarga Harapan tersebut dapat sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dikarenakan Kabupaten Bantul berada diposisi urutan pertama selama tiga tahun berturut-turut yang memiliki jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2017 (Ribuan Orang)**

Nama Wilayah	2015	2016	2017
Bantul	160,15	142,76	139,67
Gunung Kidul	155,00	139,15	135,74
Sleman	110,96	96,63	96,75
Kulon Progo	88,13	84,34	84,17
Kota Yogyakarta	35,98	32,06	32,20
<b>Total</b>	<b>550,23</b>	<b>494,94</b>	<b>488,53</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami perubahan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tahun 2015 merupakan jumlah penduduk miskin paling tinggi. Pada tahun 2016 persentase kemiskinan mengalami penurunan yaitu 142,76 dan di tahun 2017 juga

mengalami penurunan yaitu 139,67. Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi kemiskinan di Kabupaten Bantul masih tinggi.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul diasumsikan dalam pelaksanaan program-program upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah termasuk upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam Program Keluarga Harapan khususnya pelaksanaan pendampingan apakah mengalami kendala atau hambatan-hambatan. Dari hasil pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang **“Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hasil pemaparan dari latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

- 1. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016?**
- 2. Apa saja prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016?**

## **C. TUJUAN**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- b. Untuk mengetahui prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016.

#### **D. MANFAAT**

- a. Manfaat secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terutama wawasan terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia;
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan. Lebih dari itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program, agar lebih baik lagi dikemudian hari.

#### **E. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini mengangkat beberapa penelitian lain sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut



merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Ada 5 penelitian yang akan dideskripsikan. Pertama, penelitian yang berjudul "*The Efforts of Social Ministry to Prevent Poverty In GunugKidul District*" yang ditulis oleh Rahayu E.D (2017). Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang hambatan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni Ada beberapa hambatan-hambatan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam menanggulangi kemiskinan: hambatan internal, hambatan distributif, hambatan dari pemerintah desa, hambatan anggaran, hambatan eksternal.

Penelitian kedua dengan judul "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011" yang ditulis oleh Fidyatun E. (2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*explanatory research*). Dalam penelitian ini penentuan peserta PKH berdasarkan oleh data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh BPS. Data tersebut berdasarkan kriteria kemiskinan yang ditentukan oleh BPS dan kemudian divalidasi oleh pendamping PKH. PKH dibidang kesehatan di Kabupaten Brebes dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari kesuksesan program tersebut. Meskipun masih ada beberapa kendala pada awal berjalannya program disektor kesehatan, namun masalah tersebut dapat diatasi dan kini program tersebut telah berjalan semakin membaik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Putri D. (2014) dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Umbulharjo Kota Yogyakarta“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PKH bagi keluarga RTSM/KSM di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui efektivitas PKH ini dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan Pendidikan anak. Penelitian dalam studi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga RTSM, mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendidikan anak di Kecamatan Umbulharjo. Hal ini terbukti bahwa PKH, baik aspek kesehatan maupun aspek Pendidikan di kecamatan Umbulharjo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan pemerintah, meskipun di awal pelaksanaan program mengalami beberapa kendala dengan sektor kesehatan, namun hal tersebut sudah dapat diatasi dan program tersebut sudah semakin membaik dan mengalami perkembangan yang signifikan.

Penelitian yang keempat berjudul “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)” yang ditulis oleh Zufri O.R. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni peran pendamping masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan (problem) hidup secara mandiri. Pendamping, juga dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok masyarakat, melainkan mampu pula untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar seperti: melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Penelitian yang kelima dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)” yang ditulis oleh Utomo D. (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Purwoasri yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya

dan kesehatan ibu hamil dan balita. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahun nya peserta PKH mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 692 pada tahun 2009 dan menurun dari tahun ketahun sampai pada tahun 2013 ini dengan jumlah 528.

Penelitian yang keenam yang ditulis oleh Kholif, K. I. (2014) menerangkan bahwa Kecamatan Dawarblandong juga melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yakni program PKH dalam menanggulangi kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dinilai belum berhasil dikarenakan oleh beberapa hal yakni: (1). Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sesungguhnya. (2). Ditemukan adanya pelanggaran pendamping yang memiliki pekerjaan lain (double job) (3). Tujuan dari adanya pelaksanaan PKH juga dinilai belum mendapatkan hasil yang maksimal, dimana masih ditemukan adanya kemiskinan, gizi buruk, dan ibu meninggal karena melahirkan. Dari beberapa masalah tersebut dapat dinilai bahwa tidak berhasilnya pelaksanaan PKH di Kecamatan Dawaeblandong Kabupaten Mojokerto.

Penelitian yang ketujuh yang ditulis oleh Syamsir (2014) menjelaskan implementasi PKH bidang pendidikan di Kecamatan Tamalate dinilai sudah berjalan dengan baik, dimana pelaksanaanya dikontrol oleh pendamping dengan dilakukannya pertemuan rutin untuk mensosialisasikan tujuan dari PKH dan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak RTSM untuk meningkatkan

kualitas SDM. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PKH dalam bidang pendidikan dilihat dari tingkat implementability yaitu faktor isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dimana isi kebijakan masih memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan karena faktor ini erat kaitannya dengan implementer sebagai pelaksana kebijakan dan kepentingan. Sedangkan lingkungan kebijakan diatur tentang strategi actor yang menjadi pertimbangan untuk mempermudah implementasi.

Setelah adanya bantuan PKH di Kecamatan Tamalate telah membuka kesadaran RTSM bahwa miskin itu tidak baik. Hal itu terbukti, bahwa penerima bantuan PKH selalu memotivasi anak-anaknya untuk rajin sekolah, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat permasalahan yaitu diantaranya proses verifikasi pendidikan yang kurang bersahabat, koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan optimal, terkadang pihak sekolah mengalami kesulitan untuk memverifikasi karena tidak adanya data yang dipegang.

Penelitian yang kedelapan yang ditulis oleh Purwanto, S. A, dkk (2013) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto mulai seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan program, monitoring program semuanya hampir berjalan dengan lancar, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari mampu untuk merubah pola pikir masyarakat desa, yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan

pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan PKH di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Pradikta, E. P (2013), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Isi dari penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pulo berjalan baik. Namun, masih perlu adanya perbaikan pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan standart dan prosedur yang telah ditetapkan.

Penelitian yang kesepuluh ditulis oleh Matualage, P. (2015). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam program keluarga harapan yang ada di Kota Manado khususnya di Kecamatan Tuminting. Serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi pada implementasi kebijakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. nampaknya masih memiliki kendala dan masalah yang dimulai dari pendataan yang terbilang belum selektif dan belum tepat sasaran yang sebenarnya diperuntukkan bagi KSM namun belum terjangkau sepenuhnya. tidak konsistennya Peserta PKH terhadap ketentuan atau syarat yang telah di tentukan, Penyaluran Program Keluarga Harapan dinilai tidak konsisten dengan, pemyaluran pada tahap awal, dan kurangnya informasi atau pun

sosialisasi bagi peserta PKH. Berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi program PKH di Kecamatan Tuminting baik dari faktor interen dan faktor eksteren. Salah satu faktor terpenting dari program PKH ini adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

**Tabel 1. 2 Studi Terdahulu**

No	Nama Penulis, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahayu, E. D. (2017). THE EFFORTS OF SOCIAL MINISTRY TO PREVENT POVERTY IN GUNUNGKIDUL DISTRICT. <i>E-CIVICS</i> , 6(6).	Untuk mengetahui tentang hambatan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam menanggulangi kemiskinan.	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Ada beberapa hambatan-hambatan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam menanggulangi kemiskinan, diantaranya: hambatan internal, distributive, pemerintah desa, anggaran dan hambatan eksternal.
2	Fidyatun, E. (2012). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011. <i>Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro</i> , 1(2).		Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (explanatory research)	Data peserta PKH dilakukan oleh oleh BPS dan data ini didasarkan oleh kemiskinan berdasarkan 14 kriteria kemiskinan.
3	Putri, D. (2014). “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Umbulharjo Kota Yogyakarta”.	Untuk mengetahui pelaksanaan PKH bagi keluarga RTSM/KSM	Penelitian dalam studi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif	Implementasi PKH sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan harapan pemerintah.
4	Zufri, O. R. “PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	Untuk mengetahui peran pendamping dalam pegentasan	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan	Peran pendamping masyarakat melalui Program Keluarga

	DI KABUPATEN JOMBANG (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)".	kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan.	metode pendekatan kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang.	Harapan (PKH), adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan (problem) hidup secara mandiri.
5	Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , 2(1), 29-34.	untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Purwoasri yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahun nya peserta PKH mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 692 pada tahun 2009 dan menurun dari tahun ketahun sampai pada tahun 2013 ini dengan jumlah 528.
6	Matualage, P. (2015). Implementasi Kebijakan Program	Untuk mengetahui implementasi	Dalam penelitian ini penulis	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan



	Keluarga Harapan di Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting. <i>JURNAL POLITICO</i> , 2(6).	kebijakan pemerintah dalam program keluarga harapan yang ada di Kota Manado khususnya di Kecamatan Tuminting. Serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi pada implementasi kebijakan.	menggunakan jenis penelitian kualitatif.	(PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. nampaknya masih memiliki kendala. Ada beberapa faktor penghambat yang menjadi pemicu yaitu pendataan yang kurang selektif, belum tepat sasaran
7	Syamsir, N. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. <i>Skripsi Online</i> . <a href="http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1234,56789,8851">http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1234,56789,8851</a> .	Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PKH bidang Pendidikan dan untuk melihat hasil pelaksanaan PKH terhadap kelompok sasaran di Kecamatan Tamalate.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.	Implementasi PKH dibidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate sudah berjalan baik, karena pelaksanaannya selalu dikawal oleh pendamping yang sudah diseleksi oleh pemerintah.
8	Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). <i>WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora</i> , 16(2), 79-96.	Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan PKH di Kabupaten Mojokerto.	Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap atau memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.	Penelitian ini menemukan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto mulai seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan program, monitoring program semuanya hampir berjalan dengan lancar, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan

				<p>Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari mampu untuk merubah pola pikir masyarakat desa, yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik.</p>
9	<p>Pradikta, E. P., &amp; Prabawati, I. (2013). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. <i>Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan</i>, 1(3).</p>	<p>Untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat.</p>	<p>pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pulo berjalan baik. Namun, masih perlu adanya perbaikan pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan standart dan prosedur yang telah ditetapkan.</p>
10	<p>Kholif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. <i>Jurnal Administrasi Publik</i>, 2(4), 709-714.</p>	<p>Untuk menganalisis implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti</p>	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran pendamping yang mempunyai pekerjaan</p>

		pelaksanaan PKH.	adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.	lain (double job) selain pendamping dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukkan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri.
--	--	------------------	--	--

Setelah pemaparan diatas bahwa melihat dari penelitian-penelitian tersebut ada perbedaan fokus penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan variable peneliti dimana peneliti ini mengkaji tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul. Dimana biasanya kebanyakan penelitian terdahulu hanya meneliti tentang pelaksanaan program dan mengkaitkannya dengan kesehatan dan pendidikan saja dan penelitian sebelumnya tidak ada yang mengaitkan dengan pelaksanaan pendampingan.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Monitoring**

Menurut Hewitt dalam Muktiali (2009:12) Monitoring merupakan aktivitas internal proyek yang dirancang untuk mengidentifikasi *feedback* konstan pada setiap progres dari proyek tersebut, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan efisiensi dari implementasi proyek tersebut. Sementara itu,

menurut Ojha dalam Muktiali (2009:12) monitoring juga merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai apa yang telah direncanakan dalam sebuah proyek, termasuk di dalamnya adalah asumsi-asumsi atau faktor-faktor eksternal dan efek samping dari terlaksananya proyek tersebut, baik itu positif maupun negatif.

Menurut *Public Service Commission* (2008), monitoring adalah sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus dan menggunakan pengumpulan data secara sistematis tentang indikator tertentu untuk menyediakan data dan informasi serta manajemen untuk pembangunan berkelanjutan dengan indikasi tingkat kemajuan dan pencapaian tujuan dan kemajuan dalam penggunaan dana yang telah dialokasikan.

Menurut *World Health Organization*, monitoring adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang didapat dari aktivitas atau pelaksanaan suatu program/kegiatan termasuk didalamnya mengecek secara berkelanjutan atau reguler untuk melihat dan mengetahui apakah program tersebut berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang muncul selama program tersebut dapat segera diatasi (dalam Alfiannur, 2016: 22).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan atau akan untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Sedangkan menurut Helliwel dalam Widiastuti & Susanto (2014:12) memberikan definisi monitoring sebagai suatu serial observasi periodik yang dilakukan untuk menunjukkan tingkat pemenuhan standar yang telah ditetapkan atau observasi tersebut dilakukan untuk mengetahui derajat penyimpangan dari suatu norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan. Sementara itu, tidak jauh berbeda, definisi lain dari monitoring menurut Stephan dalam Widiastuti & Susanto (2014:196) adalah suatu proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Adapun lebih lanjut dijelaskan bahwa sebenarnya monitoring memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Melakukan kajian terkait dengan pelaksanaan kegiatan apakah sudah dilakukan secara *On The Track* atau sesuai dengan apa yang sudah direncanakan;
2. Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang terjadi sehingga dapat diantisipasi secara langsung dan cepat;
3. Melakukan penilaian terkait pola kinerja serta manajemen yang dilakukan sudah tepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan;
4. Mengetahui hubungan antara kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan indikator ukuran terkait progress atau kemajuan suatu kegiatan;
5. Melakukan penyesuaian kegiatan dengan kondisi yang sewaktu waktu dapat berubah, dengan tidak menyimpang dari tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa monitoring pada dasarnya adalah suatu rangkaian kegiatan dilakukan untuk mengecek dan memantau jalannya suatu program yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu, sehingga pada akhirnya akan dilaksanakan proses penilaian berkenaan dengan ketercapaian terhadap tujuan, dengan melihat dan mempertimbangkan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program dan melihat apakah kegiatan atau program tersebut telah berjalan sesuai rencana dan untuk selanjutnya dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan untuk koreksi atau penyempurnaan program atau kegiatan yang selanjutnya.

Dalam kaitannya dengan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul, monitoring dilakukan untuk melihat apakah program yang dilakukan telah berjalan sesuai rencana dan apakah program telah memenuhi indikator keberhasilan program yang telah ditetapkan.

## **2. Evaluasi**

Kata evaluasi merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000: 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda: 2009) dalam Rini Nurul (2017).

Crawford (2002) mengartikan evaluasi merupakan sebuah proses pengukuran atau penilaian untuk memahami dan mengetahui apakah suatu program/kegiatan, aktivitasnya dan keluarannya telah sesuai dengan tujuan atau indikator keberhasilan yang telah ditentukan (dalam Refando, 2016: 4).

Sementara itu menurut *Public Comission Service* (2008), pengertian Evaluasi adalah proses penentuan nilai atau penilaian yang sistematis dari suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi juga mengacu pada proses penentuan nilai dari suatu program, kegiatan, dan kebijakan. Penilaian, seperti yang sistematis dan objektif mungkin, dari yang direncanakan, sedang berlangsung, atau intervensi pembangunan yang telah selesai.

Menurut Suharto (2005:60) dalam Muhtadin (2016:5) pengertian evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan dari perencanaan program, dengan kata lain evaluasi merupakan suatu proses untuk mengukur berhasil tidaknya suatu program yang dilaksanakan, apa sebabnya berhasil dan apa sebabnya gagal, serta bagaimana tindak lanjutnya. Evaluasi juga memiliki beberapa tujuan diantaranya; a) mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, b) mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, dan c) mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana. Sedangkan menurut Soetomo (2013:349), evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dalam pelaksanaan program, mengumpulkan informasi untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan, dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan.

Konsep evaluasi menurut Mathur dan Inayatullah (dalam Soetomo 2013:349) merekomendasikan bahwa 6 evaluasi dilakukan sejak perumusan desain program. Dalam hal ini mereka membedakan evaluasi pada tiga tipe yakni: (1) evaluasi sebelum program dilaksanakan (pre-progame evaluation), (2) evaluasi pada saat program sedang berjalan (on-going evaluation), dan (3) evaluasi setelah program selesai dilaksanakan (ex-post evaluation).

Menurut Hewitt dalam Muktiali (2009) Evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. Evaluasi pada dasarnya akan bermanfaat dalam merancang proyek-proyek yang lebih baik di masa depan. Hal ini terkait dengan manfaat evaluasi itu sendiri yang mampu mengidentifikasi dampak dari sebuah proyek, sehingga dampak negatifnya dapat direduksi bahkan dihilangkan.

Dari beberapa tipe-tipe evaluasi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: a) Kegiatan evaluasi sebelum program dilaksanakan berarti melakukan penilaian terhadap terhadap desain program yang dibuat dan kelayakan program. Dengan demikian, evaluasi pada tahap ini dimungkinkan dapat dilakukan perbaikan terhadap desain program sebelum dilaksanakan. Di samping itu, dapat juga melakukan pergantian desain program apabila program yang telah didesain sebelumnya dinilai tidak layak untuk dilaksanakan. b) Evaluasi pada saat program berjalan, dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan, kelebihan, dan



kelemahannya termasuk penggunaan teknik dan metode pelaksanaannya. Evaluasi pada tahap ini sangat berguna untuk mengetahui kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan sedini mungkin, sehingga dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan program. Dalam hal ini, perbaikan dan penyempurnaan dapat dilakukan sebelum kesalahan berlanjut semakin jauh. c) Evaluasi setelah program selesai, dimaksudkan untuk melihat apakah hasil program yang diperoleh sesuai tujuan yang telah dirumuskan dalam desain program atau tidak. Hasil evaluasi pada tahap ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan keseluruhan program. Di samping itu, juga dapat digunakan untuk memberikan bahan masukan bagi perencana dan pelaksana program pemberdayaan yang sejenis pada masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi pada akhir program juga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan akhir dari pelaksanaan program dan sekaligus sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian evaluasi dan konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting untuk dilakukan dalam suatu program. Dengan adanya evaluasi tersebut dapat mengetahui kualitas dari desain program yang telah dilakukan oleh kementerian sosial sebagai ukuran, apakah program tersebut dalam pelaksanaannya sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan atau tidak. Ketika dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka evaluasi ini dapat berfungsi untuk melihat kesalahan-kesalahan desain program dan

memperbaikinya kembali sehingga penyelenggara program bisa meningkatkan kembali kualitas program yang telah didesainnya tersebut.

### **3. Nilai-Nilai Monitoring**

Menurut *Basic Concepts in Monitoring and Evaluation (2008)*, konsep-konsep nilai monitoring dan evaluasi ini berkaitan dengan model logika, karena banyak dari nilai-nilai ini dapat dijelaskan dalam hal komponen kerangka logika. Contohnya, efisiensi adalah hubungan antara output dan input, dan efektivitas adalah hubungan antara output dan hasil. Berikut nilai-nilai monitoring dan evaluasi:

**a. Standar Tinggi Etika Profesional**

Pada tingkat hasil, prinsip ini berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip etika sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Pegawai Publik, dan pada tingkat proses, apakah praktek manajemen etika atau infrastruktur etika telah didirikan di departemen.

**b. Efisiensi**

Hubungan antara input dan output, yaitu, untuk memberikan lebih banyak output untuk jumlah yang sama dari input atau output yang sama untuk jumlah penurunan masukan.

**c. Ekonomi**

Pengadaan input dengan harga terbaik dan menggunakannya tanpa pemborosan.

**d. Efektivitas**

Seberapa baik output dan tujuan hasil departemen atau program yang dicapai dan seberapa baik output menghasilkan hasil yang diinginkan. Efektivitas juga harus dilakukan dengan strategi alternatif untuk menghasilkan hasil yang sama yaitu, yang satu strategi alternatif yang tersedia akan bekerja terbaik dan akan biaya kurang.

**e. Orientasi Pembangunan**

Pada tingkat hasil, prinsip ini ditafsirkan bahwa administrasi publik harus berusaha meningkatkan kualitas hidup warga, terutama mereka yang kurang beruntung dan paling rentan. Pada tingkat proses, orientasi pembangunan berarti penggunaan partisipatif, pendekatan konsultatif untuk intervensi pembangunan; bahwa intervensi tersebut harus berbasis masyarakat, responsif dan demand driven; bahwa intervensi tersebut harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah; bahwa upaya berbagai departemen harus terintegrasi dan bahwa masyarakat dan masyarakat sumber daya harus dimanfaatkan; standar yang tinggi manajemen proyek dipertahankan; bahwa intervensi tersebut dimonitor dan dievaluasi; dan bahwa mekanisme untuk memfasilitasi pembelajaran organisasi secara sadar bekerja.

- f. Jasa harus disediakan memihak, adil, merata dan tanpa prasangka**  
Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan adil. Adil bukan berarti adanya penyamarataan terhadap semua komponen, akan tetapi adil dalam artian harus disesuaikan dengan posisinya masing-masing atau kebutuhannya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan dengan merata tanpa ada sesuatu yang terlewat dan juga tanpa adanya prasangka.
- g. Responsiveness**  
Dari perspektif organisasi, ini adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan keadaan berubah, atau, dari perspektif warga, apakah (mengubah) kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ini berarti bahwa keadaan unik orang di komunitas mereka diperhitungkan dalam desain program. Ini menyiratkan permintaan pendekatan didorong untuk pelayanan yang benar-benar mempelajari dan menanggapi kebutuhan spesifik orang, keluarga dan masyarakat, yang tinggal di spesifik daerah dan keadaan dan memiliki unik kebutuhan, nilai-nilai, kemampuan dan pengalaman dan memiliki masalah yang unik untuk bersaing.
- h. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan**  
Akuntabilitas melibatkan mengambil tanggung jawab atas tindakan seseorang dan merupakan akibat wajar dari yang diberikan mandat oleh pemilih. Akuntabilitas juga memiliki dimensi yang lebih teknis yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperhitungkan sumber daya dan penggunaannya dalam mencapai hasil yang itu dimaksudkan untuk. Kepatuhan terhadap praktik akuntansi yang diakui secara umum adalah salah satu alat yang paling berguna dalam hal ini.
- i. Administrasi public harus bertanggung jawab**  
Prinsip ini mensyaratkan bahwa masyarakat diberikan informasi yang mereka dapat gunakan untuk menilai kinerja pemerintah dan mencapai kesimpulan mereka sendiri. Hal ini juga mensyaratkan bahwa informasi yang diberikan dalam format dimengerti dan dapat diakses.

- j. Transparansi harus dipupuk dengan menyediakan publik dengan informasi yang tepat waktu, dapat diakses dan akurat**  
Prinsip ini mensyaratkan bahwa masyarakat diberikan informasi yang mereka dapat gunakan untuk menilai kinerja pemerintah dan mencapai kesimpulan mereka sendiri. Hal ini juga mensyaratkan bahwa informasi yang diberikan dalam format dimengerti dan dapat diakses.
- k. Baik Manajemen Sumber Daya Manusia dan praktek pengembangan karir, untuk memaksimalkan potensi manusia, harus dibudidayakan.**  
Prinsip ini dapat dibagi menjadi tiga aspek: Ide terbaik; Manajemen Sumber Daya Manusia Praktik; menciptakan tempat kerja di mana anggota staf memiliki rasa yang jelas dari yang dipelihara dan didukung; dan konsep sentral dari maksimalisasi potensi manusia.
- l. Administrasi publik secara umum harus mewakili rakyat Afrika Selatan, praktek kerja dan manajemen personalia berdasarkan kemampuan, objektivitas, keadilan, dan kebutuhan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dari masa lalu untuk mencapai representasi yang luas.**  
Prinsip ini menetapkan kriteria kemampuan, atau jasa, atau kinerja dalam pekerjaan dan kemajuan dalam pelayanan publik dan penilaian obyektif dan adil kemampuan tersebut, sambil menyeimbangkan ini dengan kebutuhan untuk ganti rugi dari ketidakseimbangan masa lalu dan representasi yang luas.

#### **4. Prinsip-Prinsip Monitoring dan Evaluasi**

Menurut Issac & Michael seperti yang dikutip oleh Bambang Subali, dkk menyebutkan bahwa keberhasilan suatu program tidak dapat terlepas dari segi pelaksanaannya. Maka dari itu, proses monitoring dan evaluasi terhadap suatu program akan berkaitan dengan berbagai hal, baik itu hal yang menyangkut kualitas *input*, kualitas *activities* maupun kualitas hasil pelaksanaan (*output*) program. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap suatu program dapat dilakukan dengan berdasar padakonsekuensi implementasinya, juga dapat dilakukan terhadap komponen programnya. Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut, ada beberapa prinsip

yang harus diperhatikan, berikut adalah beberapa prinsip Monitoring dan Evaluasi menurut Batho Pele (*Public Service Commition*, 2008.:34):

a. Konsultasi

Harus dikonsultasikan tentang tingkat dan kualitas pelayanan publik yang mereka terima dan, sedapat mungkin, harus diberikan pilihan tentang layanan yang ditawarkan.

b. Standar Pelayanan

Warga harus diberitahu tingkat apa dan kualitas pelayanan publik mereka akan menerima sehingga mereka menyadari apa yang diharapkan.

c. Akses

Semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke layanan yang mereka berhak.

d. *Courtesy*

Warga harus diperlakukan dengan sopan dan pertimbangan.

e. Informasi

Warga harus diberikan penuh, informasi yang akurat tentang masyarakat layanan yang mereka berhak menerima.

f. Terbuka dan Transparan

Warga harus diberitahu departemen bagaimana nasional dan provinsi dijalankan, berapa harganya dan siapa yang bertanggung jawab.

g. *Redress*

Jika standar dijanjikan layanan tidak disampaikan, warga harus ditawarkan permintaan maaf, penjelasan lengkap dan cepat dan efektif memperbaiki, dan ketika keluhan dibuat, warga harus menerima simpatik, respon positif.

h. Nilai-nilai uang yang diperhatikan

Masyarakat harus disediakan secara ekonomis dan efisien dalam memesan untuk memberikan warga mungkin nilai terbaik untuk uang.

## **5. Model Logika**

Cara sederhana untuk membuat konsep program adalah dengan menggunakan model logika. model logika banyak digunakan secara luas,

namun masih banyak unsur dari *logic model* yang penting untuk evaluasi keberhasilan program. Model logika membantu menjelaskan hubungan antara sarana dan tujuan. Model logika terdiri dari hirarki antara *inputs*, *activities*, *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.



Sumber: *Basic Concepts in Monitoring and Evaluation*, 2008

Keterangan gambar 1:

### 1. Masukan

Menurut Sjafrizal (2014), masukan adalah segala jenis hal atau sumber daya yang memberikan kontribusi atau dibutuhkan pada pelaksanaan suatu program seperti uang, tempat, tenaga, alat, bahan dasar yang digunakan serta masukan lainnya. *Input* disebut juga dengan ‘apa yang kita gunakan saat melakukan aktivitas atau pekerjaan’. Biasanya masukan dinilai dalam bentuk uang, SDM, dan metode (*man, money, methods*).

Sebagai contoh *input* diantaranya seperti sumber pendanaan baik itu pendanaan yang bersifat nasional (APBN) atau sumber dana dari daerah (APBD), atau pihak lain dalam hal ini adalah pihak swasta, kemudian selain

dalam bentuk pendanaan, *input* juga dapat berbentuk suatu bantuan pemikiran-pemikiran dari para ahli, teknokrat, atau pendapat yang muncul dari kalangan masyarakat.

## **2. Aktivitas**

Aktivitas adalah proses atau tindakan yang menggunakan berbagai *input* untuk menghasilkan *output* yang diinginkan dan akhir yang ingin dicapai.

## **3. Keluaran**

*Output* (keluaran), adalah apa saja yang dihasilkan atau diberikan secara langsung, baik bersifat fisik maupun nonfisik dari suatu pelaksanaan atau penerapan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. *Output* juga dapat didefinisikan sebagai apa yang kita berikan atau hasilkan. Dari pengukuran *output* (keluaran), suatu program yang dijalankan dan telah terpenuhi dapat diketahui keberhasilan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang telah ditentukan.

## **4. Capaian**

*Outcomes* (capaian), yaitu sejauh manakah pemanfaatan keluaran dari pelaksanaan program dan proyek secara baik. Indikator dari *outcomes* ini kelihatannya hampir sama dengan indikator *output*. Namun walaupun keluaran sudah dicapai, tetapi belum tentu capaian (*outcome*) juga dapat terpenuhi bila keluaran tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

## **5. Dampak**



Menurut Sjafrizal (2014), dampak adalah suatu pengaruh positif maupun negatif yang muncul di suatu masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan dari hasil suatu keluaran program atau aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan secara baik. Dalam hal ini dampak seringkali terlihat sama dengan manfaat. Contoh hasil dari dampak adalah seperti adanya penurunan angka kemiskinan. Dalam kaitannya dengan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

## **6. Sepuluh Tahap Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil**

Pemerintah dan organisasi beralih menerapkan monitoring dan evaluasi berbasis hasil agar alat manajemen publik dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang tepat, mengelola keuangan dan sumber daya yang ada, dan memenuhi janji-janji kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Menurut Kusek, dkk (2004) ada sepuluh tahap monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Tahapan ini berbeda dengan yang lain karena tahap monitoring dan evaluasi berbasis hasil ini memberikan rincian yang lebih jauh untuk membangun, memelihara dan yang lebih penting yakni mempertahankan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Sistem monitoring berbasis hasil ini juga berbeda dari pendekatan yang lain karena dalam tahap ini ada penilaian terhadap kesiapan.

Berikut gambar mengenai sepuluh tahap monitoring dan evaluasi berbasis hasil:



Sumber: *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System, 2004*

Keterangan:

### 1. Melakukan Penilaian Terhadap Kesiapan

Penilaian Kesiapan menyediakan kerangka berpikir analitik untuk menentukan seberapa jauh kemampuan negara untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan di dalam pencapaian tujuan pembangunan. Penilaian ini menggunakan standar kapasitas dan sistem monitoring dan evaluasi di negara tersebut. Tahap ini diibaratkan fase membangun pondasi untuk sebuah bangunan.

### 2. Menyakati Hasil Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Proses Penyusunan dan Penyepakatan Outcome: yang pertama adalah mengidentifikasi representasi stakeholder yang spesifik. Kedua mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian (hal apa yang diperhatikan) para kelompok stakeholder. Ketiga menerjemahkan masalah menjadi statement

outcome. Keempat disagregasi untuk mendapatkan kunci outcome yang diinginkan.

### **3. Menyeleksi Indikator Kunci untuk Memonitor Hasil**

Pada tahap ini akan menentukan beberapa indikator untuk proses monitoring yang diantaranya adalah: bersih, relevan, ekonomis, memadai, dan dapat dipantau.

### **4. Data Dasar Pada Indikator**

Pada tahap ini terdapat beberapa pertanyaan kunci yang akan memberikan keterangan tentang batas dasar data. Karena pada dasarnya data di inginkan harus lebih spesifik dan sesuai.

### **5. Merencanakan untuk Kemajuan – Memilih Target Hasil**

Pada tahap ini monitoring dilakukan dengan merencanakan untuk kemajuan dengan memilih target hasil. Tahap ini akan merencanakan pada sebuah kemajuan sesuai dengan target yang dipilih. Target yang dimaksud disini adalah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan outcome dan tujuan. Setiap satu indikator diharapkan memiliki satu target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

### **6. Monitoring untuk Hasil**

Dalam tahap keenam ini, penggunaan informasi dapat dilakukan untuk memonitoring. Pelaksanaan atau implementasi monitoring ini dilakukan untuk mencari cara dan strategi (yakni *inputs*, *activities*, dan *outputs* yang ditemukan dalam rencana kerja tahunan) digunakan untuk mencapai hasil yang diberikan. Cara dan strategi ini didukung dengan penggunaan alat manajemen, sumber

anggaran, dan perencanaan kegiatan. Ada dua tipe monitoring untuk mencapai hasil yakni *implementation monitoring* dan *result monitoring*.

## **7. Peran Evaluasi**

Evaluasi dilakukan sebagai penilaian dari yang direncanakan atau sedang berlangsung untuk menentukan efisiensi, efektivitas, dampak, dan juga keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk menggabungkan temuan-temuan yang ada ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tahap ini juga terdapat tipe-tipe evaluasi yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan program atau kegiatan.

## **8. Melaporkan Temuan**

Pada tahapan kedelapan dalam monitoring dan evaluasi adalah pelaporan. Pelaporan ini dilakukan dengan melaporkan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi pada suatu program. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui target atau sasaran dari program itu sendiri. Selain itu pelaporan juga dilakukan untuk memberikan data dengan jelas dan mudah dimengerti. Dalam kaitannya dengan monitoring dan evaluasi program RTLH, pelaporan ini dilakukan untuk melihat target atau sasaran dari program RTLH apakah sudah sesuai atau belum.

## **9. Penggunaan Temuan**

Dalam tahap ke sembilan ini, menggunakan temuan untuk meningkatkan kinerja adalah tujuan utama sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil.

Fokus utama dalam sistem monitoring dan evaluasi bukan hanya untuk menghasilkan informasi-informasi yang saling terkait dan berkesinambungan, tetapi untuk mendapatkan informasi untuk masyarakat yang sesuai dan secara tepat waktu sehingga *feedbacks* kinerja dapat digunakan untuk mengelola organisasi dan pemerintah. Ada sepuluh penggunaan temuan menurut Hatry (dalam Kusek, dkk, 2004) yakni respon permintaan publik untuk akuntabilitas, membantu justifikasi dan merumuskan permintaan anggaran, membantu membuat keputusan alokasi sumber operasional, mengetahui masalah dari kegiatan yang dilakukan dan mengetahui cara memperbaikinya, membantu memotivasi pegawai untuk meningkatkan pembuatan program, merumuskan dan memonitor pelaksanaan dan penerima program, menyediakan data khusus untuk evaluasi, membantu menyediakan pelayanan yang lebih efisien, mendukung usaha strategi dan perencanaan, berkomunikasi dengan masyarakat secara baik untuk membangun kepercayaan publik.

#### **10. Mempertahankan Sistem M&E Berbasis Hasil**

Pada tahap ini untuk mencapai keberlanjutan dari sistem M&E berbasis hasil adalah dengan cara menentukan peran yang jelas dan responsibilitas. Selanjutnya, menyediakan informasi yang kredibel atau dapat dipercaya. Serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan melihat akuntabilitas, kapasitas dan insentif sistem M&E berbasis hasil.

#### **7. Tipe Evaluasi**

Ada sepuluh tipe untuk menentukan dasar hasil sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil menurut Rist & Jody (2004):

### **1. Penilaian Kinerja Menggunakan Rantai Kinerja**

Penilaian Kinerja menggunakan rantai logika digunakan untuk menentukan kekuatan dan logika model sebab akibat dibalik kebijakan atau program. Model kausal membahas penyebaran dan urutan kegiatan, sumber daya, atau inisiatif kebijakan yang dapat digunakan untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam kondisi yang ada. Evaluasi akan mengatasi perubahan yang memungkinkan untuk mencapai perubahan yang diinginkan, berdasarkan upaya yang sama pada sebelumnya dan pada literatur penelitian yang ada. Tujuannya adalah untuk menghindari kegagalan dari desain yang lemah yang memiliki sedikit kesempatan untuk sukses dalam mencapai hasil yang diharapkan.

### **2. Penilaian Sebelum Implementasi**

Dari tahap penilaian sebelum implementasi ada beberapa pertanyaan yang dijadikan dasar dalam keberhasilan penilaian sebelum implementasi. Pertama, Apakah objek didefinisikan dengan baik sehingga capaiannya dapat diukur? Kedua, apakah rencana implementasi yang saling terkait dan dapat dipercaya untuk mengetahui dan membedakan implementasi yang bagus atau yang jelek? Ketiga, apakah alasan untuk distribusi sumberdaya sudah jelas dan relevan atau setara dengan persyaratan? Pertanyaan tersebut dapat dijadikan penilaian dasar keberhasilan dalam penilaian sebelum implementasi.

### **3. Proses Evaluasi Implementasi**

Dalam proses implementasi evaluasi, fokus dari proses implementasi evaluasi adalah dalam rincian dari sebuah implementasi, dimana hal tersebut menjelaskan apa yang telah dikerjakan atau tidak dikerjakan sudah terencana atau belum. Selain itu juga menilai apa kesesuaian yang telah ada diantara apa yang ditargetkan atau diangkat untuk dapat terimplementasikan dan apa yang terjadi dilapangan. Dalam proses implementasi evaluasi juga harus mempertimbangkan ketepatan dan perencanaan yang berhubungan dengan biaya (biaya-biaya yang sudah ditetapkan), syarat waktu, kapasitas dan

kabilitas staf serta kemampuan dari syarat keuangan, fasilitas dan kebijakan dan dukungan. Dalam implementasi evaluasi juga harus mempertimbangkan apa yang tidak direncanakan dalam hasil atau keluaran dari sebuah tahap implementasi program. Tahap evaluasi tidak bisa ditentukan, karena bisa terjadi dalam jangka panjang atau pendek, seluruh hambatan akan menjadi suatu pembelajaran dari proses implementasi. Pimpinan dapat menggunakan hambatan tersebut untuk menentukan apakah implementasi akan membutuhkan perbaikan untuk keberlanjutan program guna mencapai hasil yang sudah ditentukan.

#### **4. Penilaian Cepat**

Penilaian untuk implementasi yang cepat dengan umpan balik dari kemajuan suatu program atau kebijakan yang diberikan. Metodologi penilaian cepat dalam konteks tujuan penelitian yaitu untuk menyediakan waktu yang tepat, informasi yang relevan kepada pengambil keputusan dan menekankan masalah yang mereka hadapi dalam program yang diatur. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih rasional dalam kehidupan nyata. Lima metode pengumpulan data dalam penilaian cepat (1) wawancara informan kunci (2) wawancara kelompok fokus (3) wawancara masyarakat (4) observasi langsung yang terstruktur (5) survei.

#### **5. Studi Kasus**

Studi khusus adalah strategi evaluasi yang tepat untuk digunakan ketika manager membutuhkan informasi mendalam untuk mengetahui lebih jelas apa yang terjadi dengan kebijakan, program, atau proyek. Ada enam cara yang digunakan pimpinan agar dapat menarik informasi studi khusus dan menginformasikan untuk diri mereka sendiri. (1) studi kasus dapat menggambarkan kondisi yang lebih umum, (2) mereka dapat mengeksplor tentang daerah atau masalah ketika pengetahuan yang mereka miliki sedikit, (3) mereka dapat fokus pada contoh kritis (keberhasilan yang tinggi atau kegagalan yang megerikan pada program), (4) mereka dapat memeriksa

contoh implementasi secara mendalam, (5) mereka dapat melihat efek program yang muncul dari inisiatif dan akhir dari suatu program, (6) mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dari waktu ke waktu, hasil dari studi kasus dirangkum dan menghasilkan pemahaman kumulatif.

## **6. Evaluasi Dampak**

Evaluasi dampak adalah evaluasi yang mencoba untuk mengetahui perubahan yang terjadi dan apa yang dapat mereka kaitkan. Evaluasi mencoba untuk menentukan bagian mana saja dari dampak dokumentasi yang disebabkan oleh intervensi, dan apa yang mungkin datang dari peristiwa atau sebab lainnya. Tujuannya adalah mendokumentasikan perubahan atribusi. Jenis evaluasi ini sulit, terutama karena timbul setelah intervensi. Cara lain untuk mengatasi masalah atribusi adalah mengajukan pertanyaan kontra faktual. Evaluasi dampak dilakukan untuk mengetahui atau melihat dari perubahan yang terjadi (dampak), selanjutnya untuk menentukan upaya dan mendokumentasi perubahan.

## **7. Meta Evaluasi**

Meta evaluasi ini bertujuan untuk melihat kesimpulan-kesimpulan evaluasi yang ada kemudian diringkaskan. Meta evaluasi dapat menjadi cara yang cukup cepat untuk belajar “apa yang kita ketahui saat ini tentang masalah ini dan tingkat kepercayaan yang kita ketahui?”. Pada tahap ini biasanya dilakukan oleh kementerian Republik Indonesia.

Maka berdasarkan hasil analisis, Program Keluarga Harapan menggunakan tipe evaluasi *performance logic chain assessment*. *Performance Logic Chain Assessment* ini meliputi:

1. Penilaian evaluasi strategi digunakan untuk menentukan kekuatan dan logika dari sebab akibat suatu kebijakan atau program.
2. Sebab akibat model membahas tentang alasan kegagalan dan keberhasilan suatu program



3. Mengevaluasi kemungkinan hal-hal yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan biasanya ada pada setiap program.
4. Upaya-upaya untuk menghindari kegagalan dengan melihat kelemahan dalam desain yang ada

Dari keterangan diatas Program Keluarga Harapan menggunakan tipe ini karena pada pelaksanaannya evaluasi tidak hanya dilakukan diakhir/awal program saja, namun evaluasi dilaksanakan dari awal pelaksanaan program hingga tahap akhir program.

## **G. Definisi Konsepsional**

Definisi konsep adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, dapat diuraikan beberapa definisi konseptual yang akan digunakan yaitu antara lain:

### **a. Definisi Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring merupakan serangkaian aktivitas pengamatan, kontrol, pengumpulan data lapangan, dan menganalisis suatu program atau kegiatan untuk mengamati perubahan yang terjadi selama proses apakah dapat berjalan sesuai standar atau tidak, dan hasil dari serangkaian kegiatan tersebut akan digunakan untuk bahan perbaikan. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan secara terukur dan sistematis guna menindak lanjuti hasil pengawasan sehingga dapat diambil manfaat dan dampak dari suatu program. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

monitoring dan evaluasi (monev) merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung.

### **b. Prinsip-Prinsip Monitoring dan Evaluasi**

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi diperlukan suatu nilai. Nilai membantu mendefinisikan atau mengartikan apa yang dianggap sebagai standar yang baik dari sebuah administrasi publik atau standar yang baik dari suatu kegiatan atau kinerja. Nilai meliputi konsep efektivitas, efisiensi, tanggap terhadap kebutuhan dan orientasi pembangunan. Tidak hanya konsep dari monitoring dan evaluasi, tetapi nilai-nilai dan prinsip-prinsip juga harus ditaati.

## **H. Definisi Operasional**

Guna mendukung terkumpulnya semua data-data yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan hal yang terakut dengan pendampingan PKH, maka disusunlah suatu instrument pelaksanaan penelitian yakni sebagai berikut:

### **1. Monitoring dan Evaluasi**

#### **1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

- a.** Melakukan Penilaian Terhadap Kesiapan
- b.** Menyepakati Hasil Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi
- c.** Menyeleksi Indikator Kunci untuk Memonitor Hasil
- d.** Peran Evaluasi

- e. Melaporkan Temuan
- f. Penggunaan Temuan

## **2. Prinsip Monitoring dan Evaluasi**

- a. Konsultasi. Masyarakat diberikan sosialisasi mengenai program keluarga harapan.
- b. Standar Pelayanan. Masyarakat harus diberitahu tingkat dan kualitas pelayanan publik yang mereka dapat sehingga masyarakat menyadari apa yang mereka harapkan.
- c. Akses untuk Semua Masyarakat. Semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama atas pelayanan yang diberikan.
- d. Kesopanan. Masyarakat harus diperlakukan dengan sopan dan penuh pertimbangan.
- e. Informasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang penuh dan akurat tentang pelayanan publik yang mereka terima.
- f. Keterbukaan dan Transparansi. Masyarakat harus diberitahu bagaimana departemen-departemen ditingkat nasional dan provinsi dijalankan, berapa harga yang harus dibayar dan siapa yang bertanggung jawab.

## **3. Indikator Keberhasilan Program**

- a. Pendamping memberikan pengarahan mengenai prosedur dalam PKH.
- b. Mendampingi proses pengambilan dana bantuan.
- c. Diskusi Kelompok.
- d. Pendampingan secara rutin.
- e. Melakukan kunjungan KPM PKH.
- f. Memfasilitasi pengaduan.

- g. Mengunjungi penyedia layanan.
- h. Melakukan konsolidasi.
- i. Mengikuti Bimtek, Rakor dan Membuat laporan.

## **I. Metode Penelitian**

### **j. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif itu sendiri menurut Sudarwan (2002: 51) adalah sebuah penelitian yang menitikberatkan pada data yang dikumpulkan berwujud kata-kata, gambar, dan bukan berwujud angka. Adapun penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2005:6) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, sikap, motivasi, tindakan, dll., secara holistik yang diuraikan melalui deskripsi di dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Sementara itu, Nawawi dan Martini (1994:73) memandang bahwa metode penelitian deskriptif merupakan suatu cara melukiskan kondisi suatu objek atau fenomena tertentu yang didasarkan pada fakta-fakta yang terlihat yang kemudian diikuti dengan usaha untuk mengambil sebuah kesimpulan secara general dengan berdasar pada beberapa fakta historis tersebut.

### **k. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bantul, Kantor Kecamatan Kasihan dan 4 desa (desa Bangunjiwo, desa Ngestiharjo, desa Tamantirto dan desa Tirtonirmolo) yang menjadi obyek penelitian.

## **I. Jenis Data**

### **1. Data Primer**

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan oleh pen informasi, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang di teliti dan subjek itu dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan yang di peroleh secara langsung.

Sumber data nantinya diperoleh secara langsung melalui wawancara serta survey lokasi. Data primer nantinya diperoleh melalui wawancara melalui sumber-sumber yang ditetapkan seperti Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Sekretariat UPPKH Kabupaten Bantul/Kecamatan Sewon dan Pendamping Kecamatan Sewon. Peneliti akan memperdalam nantinya informasi-informasi dari narasumber terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Misalnya berapa banyak peserta PKH per kecamatan, berapa banyak pendamping yang dibutuhkan, bagaimana alur kerja sebagai seorang pendamping PKH.

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

NO	Bentuk Data Primer
1	Wawancara
2	Observasi

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau data yang gunanya untuk melengkapi data primer, data sekunder di dapat dari sumber bacaan yang terdiri dari dokumentasi arsip-arsip.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sumber data yang diperoleh bisa berupa data arsip, makalah, artikel, jurnal, internet, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data yang diperoleh nantinya juga melalui perpustakaan serta dokumen yang dimiliki Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Sekretariat UPPKH Kabupaten Bantul dan UPPKH Kecamatan beserta pendamping yang lebih memahami dan berkaitan dengan masalah penelitian.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Menurut Salim (2006: 16) terdapat dua jenis wawancara, yaitu yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tak-terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini, bahan-bahan wawancara terlebih dahulu disiapkan secara ketat sedangkan dalam wawancara tak-terstruktur yaitu menghindari ketatnya struktur bahan.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan tema atau fokus penelitian yang akan dilakukan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai diantaranya:

**Tabel 1. 3 Daftar Narasumber**

No	Narasumber	Nama Narasumber
1	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos-PPPA Kab. Bantul	Bapak Saryadi, S.IP., M.Si.
2	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos-PPPA Kab. Bantul	Ibu Rahayu Martiningtyas, S.H.
3	Koordinator Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kab. Bantul	Ibu Nanik
4	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kasihan	Mbak Irma, Mbak Ninik
5	Peserta PKH	Ibu Daliyem, Ibu Saginem, Ibu Purwanti

## 2. Dokumentasi

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2011, dalam Suryabrata, 2002: 18) studi dokumentasi adalah sebuah teknik dimana pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan yang ada mengenai data pribadi seorang responden. Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah data bahan tertulis mengenai Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul yang bisa digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

### **3. Observasi**

Menurut Salim (2006: 14) observasi dapat dilakukan dalam studi kualitatif. Di samping itu, terdapat juga berbagai observasi yang masing-masing menyangkut beberapa isu, yakni: tingkat keterlibatan, fokus yang diamati, sikap periset dan lama pengamatan. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung di lapangan terkait dengan pelaksanaan pendampingan peserta PKH. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu proses implementasi program Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).

#### **m. Teknik Analisis Data**

Proses-proses analisis kualitatif Menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman seperti yang dikutip oleh Agus Salim (2005:22-23), dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan suatu kegiatan memilah, melakukan pemusatan kegiatan yang bertumpu pada penyederhanaan, serta pentranformasian data yang di dapatkan dari lapangan dan masih bersifat data kasar.

2. Penyajian Data (*Data Display*)



Merupakan suatu aktivitas mengumpulkan informasi yang dimungkinkan untuk dapat diambil kesimpulan dan pengambilan. Biasanya data kualitatif disajikan dalam bentuk sebuah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Setelah terhimpunnya beberapa data dan sudah disajikan dalam bentuk informasi, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan di dapat berdasarkan hasil dari perangkuman analisa yang didapat dari beberapa informasi dan kesimpulan tersebut harus di verifikasi dengan maksud agar apa yang diperoleh merupakan suatu hal yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Unit analisa pada penelitian ini sesuai dengan pembahasan yang sudah menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini maka unit analisa yang akan digunakan yaitu Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Adapun teknik analisa datanya dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data-data yang bersifat matematis.

#### **J. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah mebahas mengenai masalah dalam penulisan skripsi ini, maka telah disusun sistematika penulisan yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka dasar teori. Definisi konseptual, definisi operasional metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi Objek penelitian: pada bab ini akan membahas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB III Pembahasan: dalam bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian dan analisis data yang mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul tahun 2016.

BAB IV Penutup: bab keempat ini terdiri dari dua hal yakni kesimpulan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul tahun 2016, serta saran.